

## BAB IV

### STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, tiga strategi utama pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang akan diterapkan secara berkesinambungan yakni; pemihakan, percepatan, dan pembenahan, diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam lima tahun ke depan.

#### 4.1. Pemihakan

Strategi ini dianggap sebagai salah satu pendekatan paling tepat untuk percepatan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena beberapa alasan berikut:

*Pertama*, strategi pemihakan berhubungan erat dengan empat karakteristik utama kabupaten ini. Sebagai contoh, pendekatan pemihakan mengacu pada pola pembangunan yang berpihak pada pengembangan wilayah terisolasi dan terpencil. Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menyandang predikat sebagai wilayah terpencil dan terisolasi, terutama akibat masih minimnya keberpihakan pembangunan bagi wilayah perbatasan. Selain itu, pendekatan pemihakan juga berarti fokus pembangunan mengarah pada daerah-daerah miskin, tertinggal dan rentan terhadap ancaman bencana alam. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu wilayah tertinggal dan miskin yang ditandai dengan minimnya sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, ekonomi dan layanan masyarakat. Wilayah ini juga dikenal sebagai daerah rawan bencana karena terletak pada alur gunung berapi. Selanjutnya, pendekatan pemihakan juga mengandung makna bahwa pembangunan harus berpihak pada wilayah-wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh oleh pembangunan, terutama pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan. Sebagai daerah kepulauan dengan sebagian pulau berbatasan dengan negara lain (Pilipina) dan sebagian besar tidak berpenghuni (73%), Kabupaten Kepulauan Sangihe mutlak membutuhkan pendekatan-pendekatan pembangunan yang berpihak pada pembangunan berbasis kepulauan. Hal ini amat penting yang penting artinya tidak saja pada skala lokal, maupun regional tetapi pada tingkat nasional karena posisi strategisnya. Ciri-ciri wilayah seperti ini secara tegas menyiratkan bahwa tidak ada cara lain yang lebih efektif dan efisien untuk membangun Kabupaten Kepulauan Sangihe, kecuali dengan menerapkan pendekatan-pendekatan pembangunan yang berpihak pada empat karakteristik wilayah kabupaten ini. Dengan demikian, strategi pemihakan memiliki nilai strategis untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

*Kedua*, pemihakan sangat krusial bagi pembangunan pulau-pulau kecil yang umumnya rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia. Seperti halnya ciri-ciri utama pada kebanyakan pulau-pulau kecil, secara umum pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik yang cukup tinggi, namun sangat rentan terhadap perubahan alam akibat daya dukung lingkungan sangat terbatas. Perubahan-perubahan ini umumnya turut dipicu oleh aktivitas manusia seperti penambangan karang, penebangan hutan termasuk hutan mangrove dan lain sebagainya. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan, terutama dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun instrumen untuk pengawasan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat tidak memadai. Akibatnya, eksploitasi sumberdaya yang berlangsung secara tidak terkendali telah memicu kerusakan lingkungan cukup serius di Kabupaten ini.

*Ketiga*, pendekatan pemihakan penting untuk memperkecil kesenjangan antara wilayah relatif cepat berkembang dengan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan. Pada tahapan ini, pemihakan akan diarahkan untuk memperbaiki dan memperkuat berbagai program pemerintah dalam membangun pulau-pulau kecil di daerah perbatasan. Sebagai contoh, program-program yang selama ini umumnya belum disertai dengan komitmen yang kuat, alokasi dana dan upaya-upaya konkrit ke arah pembangunan pulau-pulau kecil. Akibatnya, upaya-upaya pembangunan wilayah kepulauan termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe belum mampu memberikan hasil-hasil yang membahagakan. Untuk mencapai tujuan ini, pemihakan akan ditujukan untuk pembangunan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan dengan melibatkan pengelolaan pulau-pulau kecil secara integratif.

#### **4.2. Pembinaan**

Strategi penting lainnya yang akan mendukung program pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah pendekatan pembinaan yang akan diarahkan pada sejumlah aspek penting dan strategis bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe berikut ini:

Pembinaan dibutuhkan untuk reformasi di bidang pemerintahan. Pada tahapan ini, pembinaan akan diarahkan pada reformasi institusional, mekanisme dan kinerja pelayanan dari berbagai institusi publik berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government* sehingga semua institusi ini dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek lain yang akan dibenahi antara lain, regulasi-regulasi daerah yang dinilai tidak relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah akan disesuaikan dan pada saat bersamaan regulasi baru yang akan mendukung percepatan pembangunan daerah akan disusun. Selain itu, pembinaan terkait dengan struktur pemerintahan dan kondisi wilayah sehubungan dengan pemekaran-pemekaran

wilayah baru seperti kabupaten, kota bahkan propinsi perlu dilakukan. Selanjutnya, sudah saatnya pemerintah daerah menerapkan prinsip miskin struktur kaya fungsi, rekrutmen PNS dan promosi pejabat berdasarkan kompetensi dan *track record*. Terakhir, pembentukan institusi yang akan menangani masalah terkait dengan bencana alam seperti sistem peringatan dini, evakuasi bencana dan lain sebagainya perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah.

Pembenahan terkait dengan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan juga krusial. Beberapa aspek seperti penyediaan infrastruktur dasar dan perjanjian-perjanjian serta kesepakatan perdagangan seperti *Border Crossing Agreement* akan dijadikan target pembenahan utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, pembenahan juga akan ditujukan untuk memangkas kebijakan-kebijakan dan regulasi penyebab biaya ekonomi tinggi, rencana tata ruang wilayah (RTRW), penyiapan master plan di setiap bidang pembangunan sektor-sektor ekonomi strategis. Upaya-upaya strategis lainnya adalah penyiapan lokasi-lokasi *industrial estate*, kemudahan pengurusan pertanahan, penciptaan insentif untuk investor serta penerbitan perda investasi daerah.

Pembenahan juga dibutuhkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya sehingga pemanfaatan berkelanjutan dapat dicapai. Dalam konteks ini, penyesuaian regulasi-regulasi daerah dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan hidup serta upaya-upaya konkrit yang bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan hidup perlu ditetapkan mengingat degradasi lingkungan yang terus berlangsung di kabupaten ini.

### 4.3 Percepatan

Percepatan pembangunan diarahkan pada pengembangan kegiatan-kegiatan sektor riil dan sektor ekonomi unggulan dengan mengacu pada **konsep pengembangan klaster** (SK Bupati Nomor 167 Tahun 2005) atau satuan wilayah pengembangan. Pembangunan berbasis klaster ini diharapkan tidak saja akan mampu mengurangi kesenjangan di antara klaster terutama klaster-klaster seperti Pulau Sangihe Besar dan Siau dengan Klaster Perbatasan atau Tatoareng, lebih dari itu pembangunan berbasis klaster ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pemerataan pembangunan di tiap klaster akan diupayakan dengan memperhatikan secara cermat karakteristik masing-masing satuan wilayah pengembangan. Adapun sektor-sektor seperti perikanan dan kelautan, pariwisata dan pertanian menjadi sektor-sektor unggulan. Pada tahap ini, fokus utama implementasi kebijakan daerah diarahkan pada pengembangan program kegiatan di sektor riil dan sektor ekonomi unggulan. Program-program kegiatan ditujukan untuk menciptakan kondisi

ekonomi yang kondusif dan kompetitif dan mampu menari investasi baru dari sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi penduduk miskin serta jumlah pengangguran. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk *e-commerce*, penguatan kelembagaan dan adopsi standar mutu bertaraf internasional dalam rangka perbaikan kualitas produk andalan seperti pertanian, perikanan dan lain sebagainya akan diterapkan guna menunjang percepatan pembangunan perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, percepatan pembangunan juga perlu didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal ini, pendirian perguruan tinggi yang akan mendukung pengembangan berbagai sektor andalan merupakan syarat mutlak. Selanjutnya, percepatan pembangunan takkan tercapai tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, pengembangan berbagai sarana dan prasarana merupakan salah satu kebutuhan mendesak termasuk dalam pembangunan jangka menengah.

Melalui tiga pendekatan utama pembangunan daerah yang dilakukan secara simultan dan didukung dengan komitmen pembiayaan serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diharapkan sejumlah masalah jangka pendek dan menengah yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dipecahkan. Sudah tentu, konsistensi dan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2007 - 2011) sangat dibutuhkan.

Adapun sejumlah aspek penting pendekatan-pendekatan pembangunan tersebut di atas berlandaskan pada prinsip berikut:

- a. **Berorientasi pada masyarakat.** Masyarakat di daerah adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga program pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat yang hasil dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
- b. **Sesuai dengan kebutuhan masyarakat.** Proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan daerah dan masyarakat terakomodir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung serta dapat memberdayakan masyarakat;
- c. **Sesuai dengan Adat dan Budaya masyarakat.** Pengembangan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan adat, budaya dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya kasanah budaya bangsa dalam kerangka orientasi lokal, nasional, regional, dan global;

- d. **Berwawasan Lingkungan.** Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di daerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
- e. **Tidak diskriminatif.** Pelaksanaan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kecamatan, kampung/kelurahan sesuai pengembangan 6 klaster wilayah kepulauan serta tidak diskriminatif sara. Sehingga tidak akan bias pada kepentingan tertentu.
- f. **Kemitraan.** Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah.
- g. **Berbasis Pemerintahan yang bersih.** Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada *clean governments dan good governance*;
- h. **Anggaran berbasis kinerja.** Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistim anggaran berbasis kinerja.